



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,04	70,52	0,69
2	Angka Kemiskinan	13,34	14,13	5,92
3	Angka Pengangguran*	1,92	1,95	1,56
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,06	4,03	-0,74
5	Pendapatan Per kapita	55.375,46	57.706,39	4,21
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,33	0,284	-13,94

Sumber data : BPS Kab. Musi Rawas

II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	63,48%
1.1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	200
1.2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7.916
1.3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	7.916
1.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	55
1.5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	689
1.6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	268
1.7	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan	314

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
	pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,52%
2.1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	388
2.2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	43.278
2.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	20.918
2.4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	43.278
2.5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.918
2.6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	946
2.7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	270
2.8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3176
2.9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1331
2.10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1235
2.11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	126
2.12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	37
2.13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	224
2.14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1143
2.15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	341
2.16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	318
2.17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	70
2.18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	38
2.19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	51
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,24%
3.1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	388
3.2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	43.278
3.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	20.918
3.4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	43.278
3.5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.918

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
3.6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	946
3.7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	270
3.8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3176
3.9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1331
3.10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1235
3.11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	126
3.12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	37
3.13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	224
3.14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1143
3.15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	341
3.16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	318
3.17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	70
3.18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	38
3.19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	51
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	81,66%
4.1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	10
4.2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1389
4.3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	640
4.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	58
4.5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	139
4.6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	139
4.7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	318
4.8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	13

2. Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,601
1.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00%
2.1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	97,88%
3.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	'1. Vaksin Tetanus

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		Difteri (Td) : 97,88% 2. Tablet Tambah Darah : 97,88% 3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Test Kehamilan) : 97,88% 4. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Pemeriksaan HB) : 97,88% 5. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Pemeriksaan Golongan Darah) : 97,88% 6. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil (Pemeriksaan Glukoprotein Urin) : 97,88% 7. Kartu Ibu/rekam medis : 97,88% 8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) : 97,88% 9. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) : 8.160
3.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1. Tenaga Kesehatan Dokter/dokter Spesialis kebidanan : 49 orang 2. Tenaga Kesehatan : Bidan : 307 orang 3. Tenaga kesehatan : Perawat : 419 orang
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,86%
4.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. formulir partograf : 99,86% 2. Kartu ibu (rekam medis) : 99,86% 3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) : 99,86%
4.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1. Tenaga Kesehatan Dokter/dokter Spesialis kebidanan dan Kandungan : 49 orang 2. Tenaga Kesehatan : Bidan : 307 orang 3. Tenaga kesehatan : Perawat : 419 orang
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru	85,96%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
	lahir	
5.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Vaksin Hepatitis B0 : 85,96% 2. Vitamin K1 injeksi : 85,96% 3. Salep/tetes mata antibiotik :85,96% 4. Formulir Bayi Baru Lahir : 85,96% 5. Formulir MTBM : 85,96% 6. Buku KIA : 85,96%
5.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1. Tenaga Kesehatan Dokter/dokter spesialis anak : 49 orang 2. Tenaga Kesehatan : Bidan : 307 orang 3. Tenaga Kesehatan : Perawat : 419 orang
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,80%
6.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Kuisisioner pra skrining Perkembangan : 96,80% 2. Formulir DDTK : 96,80% 3. Buku KIA : 96,80% 4. Vitamin A biru : 96,80% 5. Vitamin A merah : 96,80% 6. Vaksin Imunisasi dasar HBO : 96,80% 7. Vaksin Imunisasi dasar BCG : 96,80% 8. Vaksin Imunisasi dasar Polio : 96,80% 9. Vaksin Imunisasi dasar IPV : 96,80% 10. Vaksin Imunisasi dasar DPT-HB-Hib : 96,80% 11. Vaksin Imunisasi dasar Campak : 96,80% 12. Vaksin Imunisasi dasar Rubella : 96,80% 13. Vaksin Imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib : 96,80% 14. Vaksin Imunisasi lanjutan Campak : 96,80%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		15. Vaksin Imunisasi lanjutan Rubella : 96,80% 16. Jarum suntik dan BHP :96,80% 17. Peralatan Anafilaktik : 96,80%
6.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1. Tenaga Kesehatan Dokter : 49 orang 2. Tenaga Kesehatan Bidan : 307 orang 3. Tenaga Kesehatan Perawat : 419 orang 4. Tenaga Kesehatan Ahli Gizi : 37 orang 5. Tenaga Kesehatan kader Kesehatan : 199 orang 6. Tenaga non Kesehatan : Guru PAUD : 199 orang
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,24%
7.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Buku raport kesehatan : 98,24% 2. Buku pematuan kesehatan : 98,24% 3. Kuesioner skrining kesehatan : 98,24% 4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah di dalam sekolah : 98,24% 5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah di luar sekolah : 98,24%
7.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1. Tenaga kesehatan Dokter/dokter Gigi : 14 orang 2. Tenaga Kesehatan Bidan : 307 orang 3. Tenaga kesehatan Perawat : 419 orang 4. Tenaga kesehatan Ahli Gizi : 37 orang 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 40 orang 6. Tenaga Kesehatan Kader

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		Kesehatan : 199 orang 7. Tenaga non Kesehatan Guru : 199 orang
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
8.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Pedoman dan Media KIE : 100% 2. Alat ukur berat badan : 100% 3. Alat ukur tinggi badan : 100% 4. Alat ukur lingkar perut : 100% 5. Alat tensimeter : 100% 6. Alat glukometer : 100% 7. Alat Tes strip gula darah : 100% 8. Alat Lancet : 100% 9. Alat kapas alkohol : 100% 10. Alat KIT IVA Tes : 100% 11. Formulir pencatatan dan pelaporan SIPTM : 100%
8.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Tenaga Kesehatan Dokter : 49 orang 2. Tenaga Kesehatan Bidan : 307 orang 3. Tenaga Kesehatan Perawat : 419 orang 4. Tenaga Kesehatan Ahli Gizi : 37 orang 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 40 orang 6. Tenaga non kesehatan terlatih : 19 orang
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	94,61%
9.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Strip uji pemeriksaan gula darah kolesterol : 94,61% 2. Instrumen GDS, AMT, ADL, P3G : 94,61% 3. Buku Kesehatan Lansia : 94,61%
9.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Tenaga kesehatan dokter : 49 orang 2. Tenaga kesehatan bidan : 307 orang 3. Tenaga

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		kesehatan perawat : 419 orang 4. Tenaga kesehatan ahli gizi : 37 orang 5. Tenaga Kesehatan masyarakat : 40 orang 6. Tenaga non kesehatan terlatih : 19 orang
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,21S%
10.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan media KIE : 97,21% 2. Tensimeter : 97,21% 3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SIPTM : 97,21% 4. Obat hipertensi : 100%
10.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Tenaga kesehatan dokter : 49 orang 2. Tenaga kesehatan bidan : 307 orang 3. Tenaga kesehatan perawat : 419 orang 4. Tenaga kesehatan ahli gizi : 37 orang 5. Tenaga Kesehatan masyarakat : 40 orang
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,75%
11.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Alat Glukometer : 97,75% 2. Alat Strip Tes Gula Darah : 97,75% 3. Alat Kapas alkohol : 97,75% 4. Alat Lancet : 97,75% 5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SIPTM : 97,75% 6. Pedoman dan Media KIE : 97,75% 7. Obat Diabetes Melitus : 100%
11.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Tenaga kesehatan dokter : 49 orang 2. Tenaga kesehatan bidan :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		307 orang 3. Tenaga kesehatan perawat : 419 orang 4. Tenaga kesehatan ahli gizi : 37 orang 5. Tenaga kesehatan masyarakat : 40 orang
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00%
12.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Buku PPDGJ III : 100% 2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi : 100% 3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan : 100% 4. Media KIE : 100%
12.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Tenaga kesehatan dokter : 49 orang 2. Tenaga kesehatan perawat terlatih jiwa : 19 orang 3. Tenaga kesehatan lainnya : 19 orang
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00%
13.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Media KIE :100% 2. Reagen Zn TB : 100% 3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 : 100% 4. Pot Dahak, Kaca slide, bahan habis pakai, rak pengering : 100% 5. Catridge tes cepat molekuler : 100% 6. Formulir pencatatan dan Pelaporan : 100% 7. Pedoman SOP : 100%
13.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru : 49 orang 2. Tenaga kesehatan perawat : 419 orang 3. Tenaga kesehatan analis teknik laboratorium medik (ATLM) :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		24 orang 4. Tenaga kesehatan penata rontgen : 19 orang 5. Tenaga kesehatan masyarakat : 40 orang 6. Tenaga non kesehatan terlatih : 19 orang
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	93,87%
14.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Media KIE : 93,87% 2. Tes Cepat HIV (RDT) pertama : 93,87% 3. Bahan Media habis pakai :93,87% 4. Alat tulis rekam medis : 93,87%
14.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Tenaga kesehatan dokter : 40 orang 2. Tenaga kesehatan : Bidan : 307 orang 3. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) : 24 orang 4. Tenaga kesehatan masyarakat : 40 orang 5. Tenaga non kesehatan terlatih : 19 orang

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	55,16%
1.1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	309.285
1.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	92544,58
1.3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-
1.4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-
1.5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	-
1.6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Ada
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0,00%
2.1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0,00%
2.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0,00%
2.3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0,00%
2.4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0,00%
2.5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata Pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada
2.6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada
2.7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	52,42%
3.1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	61,20%
3.2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	28,69%
3.3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	100,00%
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	99,27%
4.1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada
4.2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak Ada
4.3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	Ada, 1
4.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0
4.5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	1
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,25%
5.1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	127.858
5.2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1.725
5.3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	133.083
5.4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0
5.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0
5.6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0
5.7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	90,92%
5.8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0,00%
5.9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	9,38%
5.10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	95,36%
5.11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0,00%
5.12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0,00%
5.13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	8,58%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
5.14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,00%
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,00%
6.1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	74,93%
6.2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	61
6.3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada
6.4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Tidak ada
6.5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	3
6.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-
6.7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	924
6.8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	924
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	81,74%
7.1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.420,49 Km
7.2	Panjang jalan yang dibangun	0
7.3	Panjang jembatan yg dibangun	343 m
7.4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	7.334 m
7.5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	61 m
7.6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	101.604 m
7.7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	250 m
7.8	Panjang jalan yang dipelihara	11.705,14 m
7.9	Panjang jembatan yang dipelihara	0
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,00%
8.1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1
8.2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	50 orang
8.3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	-
8.4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-
8.5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada, SIRUP KAB MUSI RAWAS
8.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-
8.7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-
8.8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada 366 paket
8.9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada
8.10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0
8.11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
8.12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kab/kota	0
8.13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0
8.14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada
8.15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	133
8.19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	132
8.20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	133
8.21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-
8.22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	265
8.23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi -	0%

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	60%
1.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	1021
1.2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	9
1.3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	9
1.4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	9
1.5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	9
1.6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0
1.7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	9
1.9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0%
2.1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0 Ha
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0%
3.1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	54,83 Ha
3.2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0
3.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0 Ha
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	26,21%
4.1	Jumlah rumah di kab/kota	129.877
4.2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	174
4.3	Jumlah rumah tidak layak huni	34.051
4.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0
4.5	Rasio rumah dan KK	102,44%
4.6	Jumlah rumah pembangunan baru	1.372
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	96,18%
5.1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	12
5.2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	1261
5.3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1261
5.4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (onsite / offsite)	1261
5.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0
5.6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	107
5.7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	11
5.8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	11
5.9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
1.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	18 kali pengaduan
1.2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	200 Orang
1.3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	12
1.4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	6 SOP
1.6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada, 4 unit Mobil Damkar, 3 unit Motor Patroli, 2 Mobil Patroli, 1 Mobil Dalmas, 1 Mobil Box Logistik, Pakaian Huru Hara
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	29,27%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	42,12%
3.1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0%
3.2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0%
4.2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0%
4.3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,68%
4.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,54%
4.5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%
4.6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0%
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%
5.2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%
5.3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	52%
5.4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	14,99%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
6.1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	0
6.2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4 sektor : Pos Induk Muara Beliti, Pos Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sumber Harta
6.3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada
6.4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Ada
6.5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	10 Jenis yaitu:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		4 unit mobil Pemadam Kebakaran, 22 buah selang, 16 buah Nozel, 4 Pasang Baju, 4 pasang Sepatu, 4 buah helm, 3 buah jam tangan, 3 buah tangga, 4 buah Kampak, 2 buah mesin
6.6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	7 Orang
6.7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0
6.8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	7 Orang
7.	Waktu tanggap (responsetime) penanganan kebakaran	15 Menit

6. Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100,00%
1.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	200
1.2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	66.241
1.3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1
1.4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	66.241
1.5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2
1.6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	29.859
1.7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1
1.8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	93
1.9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	75
1.10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	2
1.11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	4
1.12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	25
1.13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	4
1.14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	2.717

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	25
1.16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	19.420
1.17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	31
1.18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	22.875
1.19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	6
1.20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	3
1.21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	6
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00%
2.1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	1.402
2.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	25
2.3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1
2.4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	28
2.5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	28
2.6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	31

III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kabupaten Musi Rawas memperoleh Skor **2,8687** dengan status **SEDANG**.

b. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 nomor

36.A/LHP/XVIII.PLG/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menyatakan bahwa Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Tahun Anggaran 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Terdapat Penekanan Suatu Hal.

IV. RINGKASANN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No Urut	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
4.	Pendapatan	1.989.021.178.570,00	1.856.765.932.626,30	93,35
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	243.186.974.823,00	107.689.471.686,30	44,28
4.2	Pendapatan Transfer - LRA	1.744.634.203.747,00	1.747.876.460.940,00	100,19
4.3	lain-lain pendapatan daerah yang sah - LRA	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00
5.	Belanja	2.081.533.264.837,00	1.925.880.899.948,63	92,52
5.1	Belanja Operasi	1.278.163.562.506,00	1.139.540.069.944,41	89,15
5.2	Belanja Modal	504.422.626.110,00	489.911.481.883,22	97,12
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0	0,00
5.4	Belanja Transfer	296.947.076.221,00	296.429.348.121,00	99,83

Sumber Data : Laporan Realisasi APBD tahun 2023 *unaudited* (BPKAD Kab. Musi Rawas)

V. INOVASI DAERAH

Adapun inovasi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sebanyak 35 (Tiga puluh lima) inovasi, sebagaimana pada tabel berikut :

No	OPD	Nama Inovasi
1	Dinas Sosial	CINTA YOSI (Cara INput daTA& pelaYanan Operator SIKS-ng)
2	Puskesmas Mangun Harjo	PROAKSI (PROMOSI KESEHATAN TERINTEGRASI)
3	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Hai Samuraeku (Hadirkan Sapi Wagyu di Musi Rawas dengan Teknologi Inseminasi Buatan (IB))
4	Puskesmas Sumber Harta	GO BINDU (Gerakan Mobile POSBINDU)
5	Puskesmas L Sidoharjo	SIAP JAKOR
6	Dinas Kependudukan Dan	KU DATANG KARENA CINTA (KU DATA ULANG

No	OPD	Nama Inovasi
	Pencatatan Sipil	KORBAN BENCANA KU CETAK DAN KU ANTAR DOKUMEN ANDA)
7	Dinas Sosial	SAMAT (SANTUNAN KEMATIAN)
8	Puskesmas Sumber Harta	CEK IBAIMUT (Cek Kesehatan Ibu Hamil Menyeluruh dan Terpadu)
9	Puskesmas Muara Beliti	ANGSA EMAS (ANC BERKUALITAS EMAM MANDIRI ANAK SEHAT)
10	Dinas Pertanian Dan Peternakan	RATNA MAKIN FOPULER (Kelahiran Ternak Menggunakan Inovasi Calf Puller)
11	Puskesmas C Nawangsasi Tugumulyo	BIMO MENAWAN (PEMBERIAN INFORMASI OBAT MENGGUNAKAN WARNA PADA LANSIA)
12	Dinas Sosial	Jumat Bersaksi (Jumat Berembuk Sambil Diskusi)
13	Dinas Sosial	CEK SAMAT (CEK SANTUNAN KEMATIAN)
14	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Sistem Informasi Pengaduan Kerusakan Jalan (SIPENGEKER JALAN)
15	Puskesmas Selangit	CUKO LEMAK TB (Curhat Komunikasi Lewat Masyarakat dan Kader)
16	Dinas Pendidikan	PT. SPIRAL (Pembuatan Tinta SPIdol RAMah Lingkungan)
17	Puskesmas Muara Kati	Mencari Generasi Emas (MERIAS)
18	Puskesmas L Sidoharjo	GEMASIE (GERAKAN MASYARAKAT SADAR ASI EKSLUSIF)
19	Kecamatan BTS Ulu	BERANIK SUMUR BTS ULU (Beras Organik Suka Makmur Kec.BTS Ulu)
20	Badan Penelitian Dan Pengembangan	SENSI (Sistem Informasi Kelitbangan)
21	Puskesmas Muara Lakitan	LASEGAR (Lansia Sehat danBugar)
22	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	PASTULA (Pasukan Tawon dan Ular) Damkar Jaya
23	Puskesmas Jayaloka	SETANGKAI ASTER
24	Puskesmas Mangunharjo	Gaspol (Gerakan Sapu Bersih Penderita Penyakit Kronis dan Senam Lansia)
25	Puskesmas Sumber Harta	PENYU GEMAS (PENYULUHAN DENGAN GAMES ASYIK)
26	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	" LDR " - (LITERASI DIGITAL di RUMAH CINTA)
27	Puskesmas Jayaloka	JARAK SINGKUNGU (Jayaloka Bergerak Mengatasi Kurang Gizi Kurang Tinggi)
28	Puskesmas Megang Sakti	SANGGAR GIZI BERAKTING PRIMA (BERSAMA ATASI ANAK STUNTING DAN PEDULI RISIKO MATERNAL)
29	Dinas Pendidikan	Program Ekstrakurikuler Tahfidz (Program Unggulan) Pada SDN 05 Muara Beliti Plus
30	Dinas Ketahanan Pangan	IKAN (INFORMASI KEAMANAN PANGAN)
31	Puskesmas Terawas	MAMA PAPA PENTING (MASYARAKAT MANDIRI PAHAM PENCEGAHAN STUNTING)
32	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Proposal LAKI KU MERINDU (LAYANAN KIA, AKTA KELAHIRAN MELALUI POSYANDU)
33	Badan Penelitian Dan Pengembangan	SISA (Sistem Agenda Kelitbangan)

No	OPD	Nama Inovasi
34	Puskesmas Mangunharjo	KACA PEGI (Kartu Pasca Pemeriksaan Gigi)
35	Puskesmas Karya Sakti	"GUSI SELA (GIATKAN KUMUR DAN SIKAT GIGI DI SEKOLAH) dari Karya Sakti"
36	Puskesmas Terawas	KEKASIH IBU
37	Puskesmas Terawas	DUTA KASEH (KESEHATAN DAN BERSEH)
38	Puskesmas Terawas	sahabat sehati (sekolah hebat kesrat di hati)
39	Puskesmas Pian Raya	PENGOBATAN GIGI PUSKESMAS KELILING (PENGILING)
40	Inspektorat Daerah	WBS (Whistle Blowing System)
41	RS. Muara Beliti	POS KONSEN (Pusat Konsultasi Online Keperawatan Luka Melalui Whatsapp)
42	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Jalan Dan Jembatan Berbasis Barcode
43	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SIMATUPANG (Siang malam tunggu panggilan)
44	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Desa Kerukunan Umat Beragama
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Berbasis Elektronik Dengan Patuhi Emak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
46	Dinas Ketahanan Pangan	INFO BANG PANGKAL (Informasi Pengembangan Pangan Lokal)
47	Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah	Penginstruksian Penggunaan Aplikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah
48	Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah	Peningkatan Sistem Aplikasi PAjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
49	Dinas Perikanan	Lele Latansa (Lele Olahsan Tanpa Sisa)
50	Dinas Lingkungan Hidup	SUAMI (Sampah Untuk AMal Ibadah)
51	Puskesmas Sumber Harta	BERANTING (BERANTAS STUNTING)
52	Puskesmas Sumber Harta	MAS GIGIH TUKANG ANTING (MASALAH GIGI IBU HAMIL TUNTAS, KURANGI ANAK STUNTING)
53	Puskesmas Sungai Bunut	Juri Si Covid
54	Dinas Sosial	GERBANG MU GAKIN (GERAKAN PENGEMBANGAN MADU KLANCENG/TRIGONA UNTUK KELUARGA MISKIN)
55	Dinas Sosial	SILAPSOS (Sistem Laporan Pekerja Sosial Masyarakat)
56	Dinas Perhubungan	SMS Broadcast Blu-e
57	Puskesmas Muara Lakitan	GRAB TB (Gerakan Muara Lakitan Bebas Tuberkolosis)
58	Puskesmas Air Beliti	Payung TB
59	Puskesmas Sumber Harta	GERAKAN RABU SEHAT PERDULI REMAJA (GERPUSEPUR)
60	Puskesmas Terawas	PASCAPDURA (Pantau Awasi Calon Pengantin Terpadu dan Remaja)
61	Puskesmas Megang Sakti	GELAS MATUBA (GERAKAN LANSIA MASA TUA BAHAGIA)
62	Dinas Pemuda Dan Olahraga	SEKSI (Senam Kesegaran Jasmani)
63	Puskesmas Selangit	GERPAT PENTING (Gerakan Cepat Penurunan Stunting)

No	OPD	Nama Inovasi
64	Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman	SIGURITA (Sistem Informasi Geografis Untuk Mencari Aset Tanah dan Bangunan) Musi Rawas
65	Puskesmas Megang Sakti	Kelas ASSIX (Ayo Sukseskan ASI Eksklusif)
66	Puskesmas Muara Kelingi	GERDU TB (Gerakan Edukasi Penularan Tuberkolosis)
67	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	PERANG JARI (Pelayanan Tera/Tera Ulang Jadi Sehari)
68	Puskesmas Air Beliti	Ayo Sibaturi
69	Puskesmas Megang Sakti	Pelayanan "JEBOL PONED"(Jemput Bola PONED)
70	Puskesmas Megang Sakti	AYO "ASIK" IVA TEST (Ayo Atasi Servik Infeksi Kanker Melalui IVA Test)
71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	BINPOSTEK (BINa POS Pelayanan TEKnologi Tepat Guna Desa)
72	Puskesmas Karya Sakti	SI HEROIK (Sistem Informasi dan Manajemen tentang Herbal, Obat, Ilmu Pengetahuan Kesehatan dan Kefarmasian) dari Karya Sakti
73	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPT MELALUI MPP (Pelayanan Publik Terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik)
74	Puskesmas C Nawangsasi Tugumulyo	GREGAS MANDOR (Gerakan Keluarga Sehat Manfaatkan Daun Kelor)
75	Puskesmas Muara Lakitan	BERAKSI PADEK (Bersama Terintegrasi atasi Balita Pendek)
76	Dinas Pendidikan	ROKAPTI 2837
77	Puskesmas Ciptodadi	GENTAGA SIBUNTING (GERakan PengeNTAsan dan PenceGAhan GiZi BUruk dan StunTING)
78	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DIGITALISASI ARSIP KEPEGAWAIAN (DiAiWai)
79	Puskesmas Karya Sakti	INOVASI DALAM PEIAYANAN KIA DENGAN GERAKAN MASYARAKAT DAN KADER MELAPOR IBU HAMIL BARU (MAK-LARU)
80	Puskesmas Karya Sakti	SIMPATI (SERENTAK IMUNISASI POSTING EDUKASI VT)
81	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	LAKI MURA (Laporan Audit Kearsipan Internal Musi Rawas)
82	Puskesmas Ciptodadi	JIWA RAGAM (JIWA RAMah keluarGA Masyarakat)
83	RS. Sobirin	SI CEPAT BERAKSI [KOMUNIKASI CEPAT EFEKTIF BERBASIS TEKNOLOGI DAN INFORMASI]
84	Puskesmas L Sidoharjo	ANJELIN PUJO "Antar Jemput Ibu Bersalin Puskesmas L.Sidoharjo"
85	Puskesmas L Sidoharjo	BENERIN OBAT
86	Puskesmas Kelingi IV.C	SAKINA (Stop Angka Kematian Ibu dan Anak)
87	Puskesmas Sumber Harta	CINTA PAK SABUR (Cek Inspeksi Organ Wanita, Pantau Amati Kelompok Wanita Usia Subur)
88	Puskesmas Mangunharjo	Bunda peri (Ibu dan Anak Peduli Kesehatan Gigi)
89	Puskesmas L Sidoharjo	PUJASERA (PERGUNAKAN JAMBAN SEHAT RAKYAT AMAN)
90	Puskesmas Ciptodadi	GARDU SIVA (GERAKAN TERPADU SCREENING INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT)

No	OPD	Nama Inovasi
91	Puskesmas Sungai Bunut	Layanan Berlian (Pelayanan Antar Jemput Ibu Bersalin dengan Ambulan)
92	Puskesmas Selangit	ASIEKNYA BANGKIT (Aksi Nyata Bersama Puskesmas Selangit)
93	Puskesmas Muara Beliti	BERASTAGI (GERAKAN BERSAMA ATASI MASALAH GIZI)
94	Puskesmas L Sidoharjo	MAKIN GADU (menurunkan angka kematian ibu dan neonatus dengan antenatal terpadu)
95	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	GEREBEK BERLIN
96	Puskesmas Sumber Harta	GERAKAN PENJARINGAN TB PARU DISETIAP DUSUN DAN ROMPOK (GARDUS)
97	Puskesmas Kelingi IV.C	MAKSUBA
98	Puskesmas Megang Sakti	GA PIT TOGA (Gang sempit tanaman obat keluarga)
99	Puskesmas Muara Beliti	CHAT ME (CURAHAN HATI IBU MENYUSUI)
100	Dinas Pendidikan	KERETA CEPAT MERDEKA
101	Puskesmas Karya Sakti	LAYANGAN PUTUS” Layanan Gabungan Penyakit Tidak Menular dan TBC Pupas.
102	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Worksheet To Consolidation (WTC)
103	Puskesmas Sungai Bunut	Keranjang Pahala
104	Puskesmas Muara Beliti	PERI GEMBUL TURKIS (PERIKSA GIGI DAN MULUT SETIAP ENAM BULAN DAN TOUR KELILING PUSKESMAS)
105	Puskesmas Muara Kelingi	KELINGI KASIH (KELILING DATANGI KASUS HIPERTENSI)
106	Kecamatan Muara Lakitan	TABOK (Tanaman Obat Keluarga)
107	Puskesmas Karya Sakti	“PEMPEK PAPEDA” PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PERAWAT TENTANG PEREKAMAN ELEKTROKARDIOGRAM DASAR (PEREKAMAN ALIRAN LISTRIK JANTUNG) DI PUSKESMAS KARYA SAKTI KEC. MUARA KELINGI KAB. MUSI RAWAS
108	Puskesmas Cekar	Pena Tinta (Percepatan Penanganan Stunting pada Anak)
109	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Rindu (Rumah Inovasi Pemuda)
110	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MANTAP (Menangani Tanggapan Penyelesaian Pengaduan)
111	Puskesmas Karya Sakti	Website Aplikasi MELIASI
112	Satuan Polisi Pamong Praja An Pemadam Kebakaran	SI PAKPOL (Sistem Informasi Pelaporan Hasil Kegiatan Satpol PP)
113	Dinas Pendidikan	Panjar (Papan Aljabar) untuk Penjumlahan dan Pengurangan Bentuk Aljabar
114	Kecamatan Tugumulyo	Serikat Tolong Menolong (STM)
115	Kecamatan Megang Sakti	GERTAK SAMBEL KAMI PENTAL
116	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	DASHBOARD SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN

No	OPD	Nama Inovasi
		KEARSIPAN
117	Kecamatan Megang Sakti	JEBOL BAPAK, BU! (Jemput Bola Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan)
118	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	POLING (POJOK KONSELING) PNS
119	Kecamatan Suka Karya	PELAYANAN CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, Amanah)
120	Kecamatan Tugumulyo	UP2K Kerajinan Jumputan "Melati" yang merupakan produk atau kerajinan unggulan Kelurahan B. Srikaton
121	kecamatan BTS Ulu	VCO BTS ULU (Minyak VCO Kelapa BTS Ulu)
122	Dinas Pendidikan	ROKAPATI 2837
123	Kecamatan Suka Karya	SI CAMBUK (Silaturahmi Camat, Tokoh Adat, Masyarakat untuk Urun Rembuk)

Sumber Data : Data Inovasi Daerah (Balitbang Kab. Musi Rawas)

V. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan mekanisme penyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna, namun Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tetap berkomitmen untuk membangun Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan visi dan misi yaitu **Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, Bermartabat(MANTAB)**.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kekurangan pencapaian kinerja Tahun 2023, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan serta perlindungan-Nya kepada kita semua, Aamiin ya Robbal Alamin.

Muara Beliti, Maret 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

